

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA BULILI KECAMATAN
DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

MUTIARA BARWADI

NIM : S2118122

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA BULILI KECAMATAN
DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO

Oleh

MUTIARA BARWADI

NIM : S2118122

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

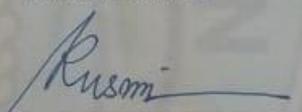
guna memperoleh gelar kesarjanaan

Gorontalo.....2022

PEMBIMBING I


Dr. ARMAN, S.Sos., M.Si
NIDN : 0913.0786.02

PEMBIMBING II


Dr. Dra. Rusni Djafar., M.PA
NIDN : 0901036601

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924.0767.01

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BULILI
KECAMATAN DUHIDAA KABUPATEN POHUWATO

Oleh

MUTIARA BARWADI

NIM : S2118122

Skripsi ini Telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji

Tanggal.....2022

KOMISI PENGUJI

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Dr. Arman, S.Sos., M.Si | |
| 2. Dr. Rusni Djafar, M.PA | |
| 3. Dr. Gretty Sy. Saleh, S.IP., M.Si | |
| 4. Iskandar Ibrahim, S.IP., M.Si | |
| 5. Hasman Umuri, S.IP., M.Si | |

MENGETAHUI,

Dekan Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo



DR. ARMAN, S.Sos., M.Si
NIDN : 0913.0786.02

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sangsi akademik, serta sangsi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo,.....2022

Yang membuat pernyataan



ABSTRACT

Mutiara Barwadi, S2118122 “Community Participation in the Implementation of Development in Bulili Village, Duhiadaa District, Pohuwato Regency

The problem in the research is how is community participation in increasing community participation in development in Bulili Village, Duhiadaa District, Pohuwato Regency,

The method in this study is to use a qualitative approach where the research carried out is descriptive, namely to find out or describe the reality of the events being studied, making it easier for the author to obtain objective data in knowing and understanding community participation in the implementation of development in the village of bulili, duhiadaa district, pohuwato district, the informants in this study the authors took/determined 8 informants consisting of the head of the bulili village (1 person), the secretary of the bulili village (1 person), the head of the bulili hamlet (1 person), the head of the BPD (1 person) and community leaders (4 people). .

The results showed that the level of community participation in the implementation of development in the village of Bulili, Duhiadaa sub-district, Pohuwato district can be measured by indicators which include: community participation in the implementation of development in the form of participation of ideas, participation of personnel, participation of property (material) and participation in In the form of skills, from each of these forms of participation, in general it can be said that community participation in the implementation of development in the Buili village, Duhiadaa sub-district, Pohuwato district is good and it is necessary to increase community participation in the implementation of development in the bulili village. This community participation i from the results of interviews with several informants still needs to be increased because these four participations also greatly determine the success or failure of a development implementation.

Keywords: community participation, implementation of development

ABSTRAK

Mutiara Barwadi, S2118122 “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato

Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah keikutsetaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato,

Metode Dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui dan memahami partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato, informan dalam penelitian ini penulis mengambil/ menentukan informan sebanyak 8 orang terdiri dari kepala desa bulili (1 orang), sekretaris desa bulili (1 orang), kepala dusun bulili (1orang), ketua BPD (1 orang) dan tokoh masyarakat (4 orang).

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato dapat diukur dengan indikator-indikator yang meliputi : partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berbentuk partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda (material) dan partisipasi dalam bentuk keterampilan, dari masing-masing bentuk partisipasi tersebut, maka secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa bulili. Partisipasi masyarakat ini dari hasil wawancara dengan beberapa informan masih perlu ada peningkatan karena ke empat partisipasi ini juga sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu pelaksanaan pembangunan.

Kata kunci : partisipasi masyarakat, pelaksanaan pembangunan

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO :

“ tidak ada kata menyerah untuk meraih impian, tidak ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa adanya usaha, kerja keras dan doa. Hidup adalah pilihan atau perjuangan,dan pilihan itu ada ditangan kita. Janganlah selalu membayakan hasil yang besar, mulailah berusaha walapun hasilnya kecil asal nyata hasilnya. Dan jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah, karena masalah datang untuk diselesaikan bukan untuk dihindari.

PERSEMPAHAN :

1. orang tua tercinta, ayah dan ibu aku terlahir dengan harapan mencoba berjalan dan berlarih meraih cita dengan mengukir tinta emas mencapai sebuah perjuangan dan menuju impian tanpa batas, dengan segala semangat dan doa, aku ingin membuat ayah ibu bahagia karna aku bisa menjadi apa yang ayah ibu inginkan, terimah kasih ayah ibu yang selama ini selalu mendoakan.
2. keluarga teman-teman dan sahabat PMII tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studiku
3. bapak dan ibu dosen sebagai inspirasi dalam semangatku menyelesaikan skripsi dan selalu mendukung serta memberikan doa-doanya untukku. Terutama kepada ibu pembimbing yang selama ini membimbing hingga aku dapat menyelesaikan studiku.

Almamaterku Tercinta

Tempat Aku Menimbah Ilmu Dikampus

Universitas ichsan Gorontalo

KATA PENGANTAR

Sebagai umat yang beragama patut untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kuasa-Nyalah penulis beroleh kekuatan dan kesehatan dalam menyelesaian tugas menyusun usulan penelitian guna untuk memenuhi prasyarat melakukan penelitian pada program studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang dialami dalam penulisan ini, namun berkat ketekunan, semuanya dapat diatasi dan oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr.Hj.Yuriko Abdussamad,M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
2. Bapak Dr.H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Ibu Darmawati Abdrazak, S.IP.,M.AP selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Arman, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, sekalugus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Ibu Dr.Hj. Rusni Djafar, MPA, selaku Pembimbing II yang yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Usulan Penelitian ini.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak membantu dalam penulis agar segera melewati perjuangan ini

7. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan yang selalu memberi motivasi atas selesainya penulisan karya ilmiah ini.

Akhirnya, menyadari akan keterbatasan dari kekurangan yang ada dalam Usulan Penelitian ini, maka kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala aktivitas kita. Amin.

Gorontalo,..... 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Konsep Kinerja	12
2.2 Konsep Pembangunan	28
2.3 Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa.....	35
2.4. Kerangka Pikir	36

BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Obyek Penelitian	37
3.2. Jenis Penelitian.....	37
3.3 Oparasional Variabel.....	37
3.4. Informan Penelitian	38
3.5. Jenis dan Sumber Data	39
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7 Teknik Analisi Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Bulili	43
4.1.2 Visi Misi.....	45
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bulili	47
4.1.4 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Bulili	48
4.2 Hasil Penelitian	56
4.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pe mbangunan di Desa Bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato.....	56
4.2.1.1 Partisipasi Dalam Bentuk Ide-ide/Pikiran.....	57
4.2.1.2 Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga.....	61
4.2.1.3 Partisipasi Dalam Bentuk Harta Benda.....	62
4.2.1.4 Partisipasi Dalam Bentuk Keterampilan	64
4.3 Pembahasan	65

BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Table 4.1 Periode Kepemimpinan Desa Bulili	46
Table 4.2 Pemerintahan Desa dan Jajarannya	54
Table 4.3 Badan Permusyawaratan Desa.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir.....	37
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Desa Bulili.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 : Rekomendasi Bebas Plagiasi

Lampiran 5 : Similariti Hasil Turnitin

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka perlu adanya kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah kabupaten dan Desa dalam memberikan perhatian positif terutama dalam mengakomodir aspirasi-aspirasi masyarakat lokal yang sebelumnya terbelenggu oleh kebijakan sentralistik dalam kurun waktu yang cukup lama. Seiring dengan berjalannya waktu kondisi itu pelan-pelan mengalami perubahan melalui berbagai macam kebijakan pemerintah terutama pemerintah pusat.

Semakin berkurangnya peranan pemerintah pusat dan provinsi di era otonomi daerah, telah menjadikan daerah, kabupaten dan Desa memiliki peran yang cukup besar dalam melaksanakan proses pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, dimana program-program kegiatan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan lebih menitik beratkan kepada keterlibatan masyarakat lokal, khususnya masyarakat desa dan kelurahan. Dengan demikian implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi saat ini, tidak berarti hanya pada penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah juga menyerahkan kewenangannya kepada masyarakat melalui pemerintah Desa dengan mengikuti mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi merupakan suatu proses yang

menuju kepada masyarakat yang di desentralisasikan.Proses desentralisasi akan menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, lebih terbuka, dan lebih partisipatif dan berinisiatif, yang semakin dituntut oleh arus globalisasi yang begitu cepat untuk merubah pemikiran dan perilaku saat ini dengan inovasi teknologi informasi.

Di dalam menjalankan roda pemerintahannya setiap negara selalu berpedoman pada kebijakan politik yang dianut negara itu, sehingga prosedur birokrasi yang ditempuh juga mengacu kepada paradigma sistem politik yang dianutnya. Seiring dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang otonomi daerah yang semula adalah di dalam UU. No. 32 Tahun 2014 Paradigma birokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari paradigma pemerintahan yang sentralistik kearah desentralistik. Perubahan ini membawa konsekuensi terhadap mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika berbagai lembaga Internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi.

Presiden Soeharto sejak tahun 1966 menerapkan konsep partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan sesuai dengan paradigma pemerintahan orde baru yang sentralistik, seluruh kebijakan pembangunan dilakukan secara “top-down”. Inisiatif dalam menetapkan kebijakan pembangunan dari atas (pejabat berwenang) tanpa melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya. Dalam kaitan ini masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam membantu dana maupun tenaga. Pada saat ini partisipasi dipandang sebagai proses mobilisasi yaitu tujuan adalah menggerakan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan. Meskipun model ini memiliki keunggulan karena pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara cepat, namun kelemahan yang dijumpai adalah masyarakat sering tidak memiliki dan tidak merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan itu.

Pendekatan baru dalam pembangunan pemberdayaan menekankan pada upaya menggalang partisipasi masyarakat untuk bersatu padu dalam membangun, yang diarahkan dengan ciri pembangunan dari bawah (bottom up). Dalam pada itu pemberdayaan people centered development approach, yaitu upaya pemberdayaan yang bertumpu pada masyarakat atau komunitas (Korten, 1988), sangat menekankan pentingnya nilai prakarsa lokal dan sumber daya komunitas. Peran yang diletakkan pada individu atau masyarakat bukanlah sebagai objek melainkan perannya sebagai subyek pembangunan, yang menentukan tujuan, mengawasi sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya. Prinsip yang dianutnya adalah bahwa peluang dan kesempatan untuk berperan secara aktif dalam kegiatan pembangunan harus

diberikan kepada mereka yang akan menanggung akibat-akibat dari praktik pembangunan tersebut (Michael C., 1984 dalam Mas'oed, 1995).

Partisipasi diberi makna sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya baik dalam proses pengambilan keputusan dan monitoring kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Berbagai peraturan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara substantif belum mengatur bagaimana partisipasi masyarakat itu dilaksanakan. Perlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap sesuai dengan surat edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. Kondisi ini menunjukan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila model ini diadopsi dalam upaya implementasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka yang diperlukan adalah keterbukaan pemerintah untuk menjadikan masukan masyarakat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan Masyarakat.

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi

masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep man-cetered development yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

Pembangunan daerah meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat di daerah yang terdiri dari berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah dengan berbagai departemen dan non departemen di daerah yang sesuai dengan tugas pokok serta tanggung jawab masing-masing. Dalam realisasi fisiknya pembangunan daerah justru bersifat menyeluruh, tersebar luas ke seluruh lapisan masyarakat yang berusaha memadukan arah pembangunan sektoral dan regional dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, tetapi bagaimanapun dalam membuat kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan

Masyarakat sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat. Jika tidak, suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Banyak contoh produk kebijakan yang sangat kontra di masyarakat sebagai akibat pemerintah senantiasa tidak membuka diri untuk melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan.

Pemberdayaan partisipasi masyarakat sipil atau “civil society” merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan pada masa-masa mendatang keterlibatan ini akan memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan diimplementasikan, karena dapat membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Penerapan model atau strategi pembangunan sebagai upaya untuk mendekati desa pernah tercetus dalam model pembangunan yang disampaikan oleh Korten (1996:76) dengan apa yang disebut) yang bentuknya sangat top down yakni model pengembangan desa yang dikendalikan oleh pemerintah pusat dengan hasil jauh dari apa yang diharapkan. Sebagai titik balik atas kegagalan model tersebut diatas, muncul model pembangunan sebagai usaha yang sama untuk mendekati desa secara cepat dengan konsep Partisipatory yang berusaha mengakomodasi kepentingan masyarakat desa dengan tekanan pada penumbuhan partisipasi masyarakat secara langsung untuk terlibat.

Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi (bercirikan top down) mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap

kebutuhan lokal Korten (1988:87). Dari pada itu, pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan berarti memberikan peluang seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka sehingga mereka berdaya.

Hasil penelitian W. Boyers (1985) menyimpulkan bahwa legitimasi dan keberhasilan dari suatu program pembangunan dalam skala nasional bagi suatu negara berkembang, program yang dilakukan dengan memperhatikan situasi dilaksanakan dari bawah ke atas (bottom-up), dan program tersebut sesuai bagi rakyat, ketimbang dilakukan secara seragam (top-down) dengan program yang didominasi oleh pemerintah pusat.

Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah dari Provinsi Gorontalo, sehingga dalam menunjang kegiatan pembangunan Kabupaten Pohuwato, maka melalui visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah, oleh karena itulah dalam menunjang visi dan misi dalam pembangunan daerah, maka perlunya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang NO 25 TAHUN 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana masyarakat memiliki hak untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah, wadah perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah adanya mekanisme perencanaan pembangunan yang berupa musyawarah perencanaan pembangunan dimana masyarakat turut berpartisipasi dalam lingkup Tingkat Desa sampai di tingkat kecamatan. Desa Bulili merupakan

salah satu Desa yang ada di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato yang telah melaksanakan proses mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah, dimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan ditingkat Desa Bulili masih sebatas turut serta, secara formalitas menghadiri proses pelaksanaan perencanaan semata karena menurut mereka bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah dengan mengikutsertakan stakeholder dapat bermanfaat untuk memberikan masukan-masukan masalah pembangunan dikegiatan tersebut, serta menurut pandangan mereka bahwa masukan yang telah diberikan oleh pemerintah ditingkat Desa akan diteruskan di tingkat Kecamatan, kemudian akan di akomodasi di tingkat pemerintah Kabupaten dalam hal ini penentu kebijakan dengan harapan besar masukan-masukan tersebut akan terealisir demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pertanyaan yang akan muncul kemudian di Kabupaten Pohuwato khususnya Kecamatan Duhiadaa desa Bulili adalah, apakah partisipasi masyarakat di dalam Proses mekanisme pelaksanaan pembangunan telah terlaksana sesuai dengan harapan dimana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam proses mekanisme pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusias masyarakat dalam menghadiri Musrenbangdes akan tetapi kemudian bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah. Karena antusias kemudian lahir ketika substansi dari proses mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah telah tercipta, akan tetapi apabila Partisipasi masyarakat sudah antusias dan pemerintah sendirilah yang lebih fokus pada

kegiatan administrasi perencanaan dan seremonial pembangunan daripada kegiatan fungsional perencanaan, maka hal ini sudah pasti menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar apakah selama ini proses mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah telah menghasilkan sesuatu yang berpihak pada masyarakat ataukah hanya sebuah rutinitas dan sistem yang harus dan wajib dilaksanakan dengan mengenyampingkan maksud dan tujuan yang sesungguhnya.

Indikasi masalah yang kemudian ditemukan dilapangan setelah calon peneliti melakukan observasi data awal adalah, terutama terlihat dari berbagai tahapan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Duhiadaa adalah antusias partisipasi masyarakat dalam kehadiran cukup maksimal, akan tetapi ketika proses pemberian masukan-masukan dalam rangka pembangunan daerah masyarakat selalu dihadapkan oleh acara seremonial Musrenbang dimana masukan-masukan tersebut diberikan kepada pemerintah dalam bentuk proposal atau dokumen-dokumen kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan setelah itu masyarakat hanya cenderung mempercayakan hasil-hasil perencanaan itu kepada pemerintah Desa dan kecamatan, mereka menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka, karena hasil perencanaan yang dihasilkan dan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan sangat jauh berbeda dengan apa yang dinginkan masyarakat. Setidaknya itulah gambaran umum yang diperoleh calon peneliti.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato .”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam peneltian ini adalah : Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bulili Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan pembangunan di Desa Bulili di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat akademis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat menunjang bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan (studi kebijakan Masyarakat), serta dapat memperkaya khasanah kepustakaan daerah tentang analisis implementasi kebijakan dan dapat mendukung/menjadi kerangka acuan, bahan masukan ataupun bahan pembanding bagi yang akan melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran dalam melakukan implementasi kebijakan pelaksanaan pembangunan dan kiranya dapat berguna bagi Pemerintah

Kabupaten Pohuwato sebagai suatu bahan informasi, masukan (input) dalam melaksanakan aktifitas implementasi kebijakan yang berkualitas dan lebih baik lagi di masa mendatang.

1.4.3 Manfaat bagi penulis, dapat menambah dan memperluas wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, serta merupakan pembelajaran dan pengalaman yang berharga dalam mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan. Sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep partisipasi masyarakat

Istilah partisipasi sering diartikan “keikutsertaan”, namun secara umum belum ada pengertian baku. Hal ini disebabkan karena penggunaan istilah partisipasi itu sendiri tergantung dari ruang lingkup dan sudut pandang pemakaian istilah tersebut. Demikian halnya istilah partisipasi yang dimaksud dalam lingkup dan sudut pandang aktifitas masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi yang dikenal keikutsertaan masyarakat atau keterlibatan secara aktif warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Menurut Sastropoetro (1995) memberikan definisi. “Partisipasi adalah keikutsertaan, peranserta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaaan lahiriahnya” Sedangkan Cristovao menyatakan bahwa : *“Participation becomes, then, people's involvement in reflection and action, a process of empowerment and active involvement in decision making throughout a programme, and access and control over resources and institutions”*.

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill (PTO PNPM PPK, 2007). Hoofsteede (1971) menyatakan bahwa : “partisipasi adalah *the taking part in one ore more phases of the process* sedangkan Keith Davis

(1967) menyatakan bahwa partisipasi “*as mental and emotional involvement of persons of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*”.

Verhangen (1979) dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa: “Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat”. Theodorson dalam Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa : “Dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan.

Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesi sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan”. (Berlo, 1961).

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah: “Proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan

pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”.

Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep man-centered development yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

a. Typologi Partisipasi Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat “sulit diajak maju” oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan karena sudah adanya campur tangan dari pihak penguasa. Berikut adalah macam tipologi partisipasi masyarakat.

- 1). Partisipasi Pasif / manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak

oleh pelakasan proyek yang memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.

- 2). Partisipasi Informatif memiliki karakteristik dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberikesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akuarasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
- 3). Partisipasi konsultatif dengan karakteristik masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembutsn keputusan bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) atau tindak lanjut
- 4). Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan korbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan- kegiatan setelah intensif dihentikan.
- 5). Partisipasi fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang di sepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
- 6). Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan

kelembagaan dan cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman prespektif dalam proses belajar mengajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan- keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

- 7). Self mobilization (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan

b. Tahap-Tahap Partisipasi

Uraian dari masing-masing tahapan partisipasi adalah sebagai berikut :

- 1). Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program

pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal (Mardikanto ; 2001).

- 2). Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan. Slamet (1993) membedakan ada tingkatan partisipasi yaitu : partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumusan tujuan, maksud dan target. Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang baru adalah mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Pengetahuan para perencana teknis yang berasal dari atas umumnya amat mendalam. Oleh karena keadaan ini, peranan masyarakat sendirilah akhirnya yang mau membuat pilihan akhir sebab mereka yang akan menanggung kehidupan mereka. Oleh sebab itu, sistem perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau perencanaan teknis atasan (Slamet, 1993).
- 3). Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi

masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan (Mardikanto, 2001).

- 4). Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan (Mardikanto, 2001).
- 5). Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu,

pemanfaaan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang (Mardikanto, 2001).

c. Tingkat Kesukarelaan Partisipasi

Dusseldorf (1981) membedakan adanya beberapa jenjang sukarelaan sebagai berikut:

- 1). Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri.
- 2). Partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar; meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.
- 3). Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peranserta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperanserta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya.
- 4). Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.

5). Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

Lebih rinci Slamet menjelaskan tiga persyaratan yang menyangkut faktor-faktor Partisipasi Masyarakat kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi adalah sebagai berikut:

1. Kemauan

Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak luar). Tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya diperlukan sikap-sikap yang:

- 1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan.
- 2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya.
- 3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas sendiri.
- 4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan.
- 5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

Sementara Mardikanto (1994) menyatakan bahwa pembangunan yang partisipatoris tidak sekedar dimaksudkan untuk mencapai perbaikan kesejahteraan masyarakat (secara material), akan tetapi harus mampu menjadikan warga masyarakatnya menjadi lebih kreatif. Karena itu setiap hubungan atau interaksi

antara orang luar dengan masyarakat sasaran yang sifatnya asimetris (seperti: menggurui, hak yang tidak sama dalam berbicara, serta mekanisme yang menindas) tidak boleh terjadi.

Dengan dimikian, setiap pelaksanaan aksi tidak hanya dilakukan dengan mengirimkan orang dari luar ke dalam masrakat sasaran, akan tetapi secara bertahap harus semakin memanfaatkan orang-orang dalam untuk merumuskan perencanaan yang sebaik-baiknya dalam masyarakatnya sendiri. Mardikanto (2003) menjelaskan adanya kesempatan yang diberikan, sering merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan sangat menentukan kemampuannya. Syarat kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Sebab, kesempatan dan kemampuan yang cukup, belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk (turut) membangun. Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong seseorang untuk meningkatkan kemam-puan dan aktif memburu serta memanfaatkan setiap kesempatan. (Mardikanto,2003).

Mardikanto (2003) menjelaskan: “Beberapa kesempatan yang dimaksud adalah kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembagunan, baik dalam pengambilan kepu-tusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan; sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah”. Selain hal tersebut terdapat kesempatan-kesempatan yang lain diantaranya kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan, kesempatan memanfaatkan dan

memobilisasi sumber daya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan. Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat (termasuk peralatan perlengkapan penunjangnya). Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan, dan Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat (Mardikanto,2003).

Bintoro (1986 : 223-224) berpendapat bahwa: “Partisipasi ialah suatu kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan atas dasar kesukarelaan. Ia menjadi mobilisasi apabila ekstrin yang menggerakkan untuk kegiatan tertentu (mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri) suatu pekerjaan atau suatu gotong royong.” Sedangkan Pasaribu (1988 : 78-79) “Bentuk partisipasi ialah 1) partisipasi buah pikiran, 2) partisipasi tenaga, 3) partisipasi harta benda, 4) partisipasi keterampilan.

- a) Partisipasi buah pikiran, adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu komunitas atau organisasi dalam bentuk ide-ide pemikiran, baik dalam tahapan pira rencana, maupun dalam penyusunan rencana serta implementasinya, seperti ikut dalam pertemuan dan rapat ataupun melakukan kritik dan sara atas apa yang sedang akan dilaksanakan.
- b) Partisipasi tenaga, adalah suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan untuk kepentingan bersama, yang umumnya dalam

bentuk gotong royong, seperti aktif dalam perbaikan-perbaikan saluran-saluran air (drainase), pos kamling, sarana ibadah dan lain-lain sebagainya.

- c) Partisipasi harta benda (materi), yaitu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di lingkungannya dalam bentuk memberikan sumbangan harta benda berupa uang atau materi baik sukarela maupun sedikit mobilisasi.
- d) Partisipasi keterampilan, yaitu keterlibatan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan keterampilan atau keahlian yang dimilikinya, seperti keahlian dalam bidang perencanaan, menggambar (arsitek), keahlian bidang pertukangan (tukang batu,tukang kayu), dan lain-lain sebagainya.

Davis (2002:427) : mengatakan bahwa : Partisipasi adalah dorongan mental dan emotional dari seseorang atau kelompok yang menggerakkan mereka bersama-sama mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab. Kenyataannya dalam setiap program pembangunan di daerah-daerah pedesaan, partisipasi masyarakat lebih banyak dimobilisasi batau diarahkan, sehingga keterlibatan mereka sebagai obyek lebih dominan dari pada sebagai subyek. Padahal sesungguhnya partisipasi masyarakat itu menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Dalam teks konsepsi itu.

Siagian (2003:30) mengatakan bahwa : “Partisipasi masyarakat adalah mereka yang melaksanakan berbagai kegiatan dalam pembangunan, dimana rakyat yang akhirnya memegang peranan sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan”. Selanjutnya menurut Tickson (2004: 11-12), mengemukakan bahwa: “Partisipasi merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai

stakeholder, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan ditempat mereka masing-masing.Masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka,’melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumber daya dan penggunaannya”

Dengan demikian pertisipasi pada dasarnya merupakan suatu proses fungsi masyarakat sebagai stake holder atau pemilik mandat dimasyarakat, seharusnya terlibat dalam mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan.

Selanjutnya Amien (2003:57) menyatakan : “Perlunya perlibatan masyarakat dalam pembangunan setidaknya berbasis pada tiga pertimbangan. Pertama untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang diperlukan agar proses pembangunan memiliki kemungkinan yang semakin besar untuk berhasil atau dengan kata lain mengurangi ketidakpastian. Kedua untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketiga sebagai perwujudan dan diversivitas proses pengambilan keputusan” Partisipasi masyarakat terhadap pemerintah akan sangat ditentukan oleh iklim yang diciptakan oleh pemerintah itu. Jika iklim demokrasi yang diciptakan, maka partisipasinya akan terwujud dengan sukarela dan bukan partisipasi yang dimobilisasi atau diarahkan. Sebaliknya, bila iklim otoriter sentralistik yang diciptakan maka akan melahirkan suasana partisipasi semu, dimana masyarakat hanya terlibat secara fisik dalam setiap program kegiatan, sedangkan mental dan emosinya tidak terlibat.Oleh karenanya dalam setiap pemerintahan yang demoikratis, partisipasi masyarakat merupakan suatu yang niscaya diperlukan. Karena apa yang dilakukan

oleh pemerintah dalam mengelolah kepemerintahannya, haruslah selalu bersandar pada apa yang menjadi aspirasi atau kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, pemerintah harus menganggap bahwa mengakomodasi atau melayani aspirasi masyarakat merupakan kewajiban mutlak, sementara keikutsertaan masyarakat dalam segala dan atau sepanjang proses penyelenggaraan pemerintah merupakan hak yang harus dijamin adanya.

Menurut Satropoetro (1998), ada tiga hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu: “(1) Keadaan social masyarakat, (2) Kegiatan penyusunan program pembangunan,(3) Keadaan alam sekitar. Keadaan social masyarakat meliputi pendidikan, pendapatan, kebiasaan, dan kedudukan social. Kegiatan program pembangunan merupakan kegiatan yang dirumuskan dan dikendalikan oleh pemerintah, Sedangkan alam sekitar mencakup factor fisik atau keadaan geografi daerah yang ada pada lingkungan tempat hidup masyarakat tersebut.

Lebih lanjut Beratha (1982), mengatakan bahwa : “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat bergantung pada peran pemerintah dalam memberikan motivasi yang mengarah pada kreativitas masyarakat. Sedikitnya terdapat empat jenis tahapan partisipasi, yaitu :

a) Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Kegiatan utama dalam partisipasi pada tahap perencanaan adalah penciptaan ide-ide, perumusan dan pilihan, sasaran/tujuan. Keterlibatan masyarakat dibawah koordinasi aparat dan tokoh masyarakat. Masyarakat hanya akan terlibat dalam aktivitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut

andil dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan.

b) Partisipasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan

Hal ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan, yang berwujud tenaga, uang barang material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

c) Partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan

Setiap warga masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama. Demikian pula halnya penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, masyarakat harus menikmati hasil-hasil jyang dicapai. Partisipasi dalam menikmmati hasil pembangunan ini dapat ditinjau dari aspek, yaitu aspek manfaat materialnya, manfaat social dan manfaat pribadi.

d) Partisipasi dalam mengevaluasi program pembangunan.

Partisipasi langsung maupun tidak langsung yang dilakukan dalam mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan sangat penting artinya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terlibat secara langsung dalam member saran terhadap pelaksanaan pembangunan. Partisipasi tidak langsung adalah evaluasi yang dilakukan melalui perwakilan.

Sementara itu Tjokro Winanto dalam rakhmat (1996), juga menjustifikasi bahwa ada beberapa alasan perubahan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu : (1) Partisipasi merupakan akibat logis dari pembangunan, (2) Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan

pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat, (3) Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik informasi tentang sikap, aspirasi keputusan dan potensi daerah, (4) Partisipasi dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk membangun guna memenuhi kebutuhan khas daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa pertisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dan ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkonstribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan yang

dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara maksimal.

Disebut ada partisipasi lengkap bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh enam tahap dari proses pembangunan terencana. Disebut partisipasi sebagian bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat di dalam seluruh enam tahap itu. Dengan perkataan lain, seseorang tetap dianggap berpartisipasi sebagian sekalipun dia terlibat dalam lima tahap, lebih-lebih bila kurang dari itu.

2.2 Konsep Pembangunan

2.1. Pengertian Pembangunan

Johara T. Jayadinata Dalam buku Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah (2002 : 23) : “Pembangunan ialah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada, pembangunan dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dapat merupakan pembangunan fisik, dan dapat merupakan pembangunan social ekonomi. Pembangunan nasional meliputi seluruh Negara dengan tekanan pada perekonomian. Pembangunan lokal meliputi kawasan kecil dengan tekanan pada keadaan fisik. Pembangunan regional meliputi suatu wilayah dan mempunyai tekanan utama pada perekonomian dan tekanan kedua pada keadaan fisik, sehingga merupakan gabungan dari kedua hal tersebut di atas.

Siagian (2003) menyatakan bahwa : “Rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh

suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).”“Pembanguna pada dirinya mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih “baik” dari kondisi yang kini ada. Kondisi yang lebih “baik” itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan oleh karenanya tidak hanya “baik” dalam arti peningkatan taraf hidup, misalnya. Akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Manusia bukan hanya makhluk ekonomi, akan tetapi juga makhluk social dan makhluk politik.”

Siagian (2003) menyatakan bahwa : “Rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).” Menurut Soerjodibroto (2001), “dalam era otonomi, rencana pembangunan hendaknya disusun berdasarkan prioritas secara efektif dan efisien. Masyarakat (desa/kelurahan dan kecamatan) perlu dilakukan upaya “pengenalan lingkungan “baik masalah yang ada maupun potensinya. Pengenalan lingkungan ini tidak hanya dalam pembangunan fisik saja, tetapi lebih jauh dalam hal pelayanan umum, social, ekonomi serta budaya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menyusun daftar usulan proyek tanpa didasari analisis masalah dan potensi. Masyarakat dikenalkan untuk membangun sesuai dengan kapasitas yang ada, artinya semaksimal mungkin masyarakat menangani permasalahan yang dapat ditangani sendiri dan masalah yang hanya dapat ditangani pihak lain disusun menurut prioritasnya.”

Kontribusi para pelaku pembangunan dalam setiap pelaksana Musrenbang desa/kelurahan dan Musrenbang kecamatan dapat berupa sumbangan pemikiran, pemanfaatan tenaga dan bahan material (sumbangan sukarela masyarakat), sadangkan kelembagaan masyarakat dapat dilihat dari sejauhmana mereka memfasilitasi masyarakat dalam proses pengusulan program/kegiatan, meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat secara aktif. Hal tersebut dapat terlihat dari antusiasme kelompok masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang ada (Rule of the game), yang memberikan ruang/kesempatan seluas-luasnya kepada semua stakeholder untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga dalam masyarakat timbul adanya rasa memiliki (Sense of belonging) terhadap pembangunan.

Oleh karena itu pada masa yang akan datang peran pemerintah adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan sekaligus mengatur/mengendalikan agar pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdampak negative atau menimbulkan konflik dengan kelompok atau golongan masyarakat lainnya. Bahkan pemerintah semestinya mampu menciptakan sinergi bebagai kegiatan pembanguna dan mendorong masyarakat untuk saling berinteraksi, dengan tetap memperhatikan tata nilai yang ada dalam mesyarakat itu sendiri.

Sesungguhnyalah penyusunan kebijakan Masyarakat sejak awal melibatkan masyarakat secara bersama-sama menentukan, sehingga melahirkan sebuah kebijakan yang adil dan demokratis. Pembuat kebijakan yang demokratis menawarkan dan menjunjung tinggi pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Melalui cara

partisipatif seperti itu akan melahirkan suatu keputusan bersama yang adil dari pemerintah untuk rakyatnya, sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Keputusan pemerintah yang mencerminkan keputusan rakyat yang akan mendorong terjadinya suatu sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

Pasca reformasi, partisipasi masyarakat menjadi perbincangan banyak kalangan mulai dari penyelenggaraan Negara sampai masyarakat dipelosok negeri ini. Aparat Negara mengerti betul bagaimana sebuah kebijakan harus disusun melalui sebuah proses yang patisipatif, dan apabila mereka ditanya jawabannya adalah semuanya sudah melalui proses konsultasi Masyarakat sebagai bentuk partisipasi.

Kenyataannya sampai sekarang masih terjadi gap atau jarak yang tak terjamah oleh Masyarakat dalam memberikan masukan untuk menentukan kebijakan pembangunan. Instrument hukum yang mengatur partisipasi masyarakat belum menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat itu dilaksanakan, sehingga partisipasi hanya sebatas wacana tanpa ketahuan seperti apa bentuk dan implementasi partisipasi Masyarakat ndonesia, sehingga diperoleh pemahaman mengenai bagaimana mekanisme perencanaan partisipatif disusun oleh pemerintah dan masyarakat.

Untuk lebih memudahkan mengetahui bagaimana model partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka digunakan konsep mekanisme perencanaan pembangunan daerah dimana konsep mekanisme perencanaan pembangunan mengutamakan perspektif ideal yang diharapkan

sebenarnya adalah bagaimana masyarakat sebagai salah satu stakeholders kunci, diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan. Serta upaya untuk mewujudkan mekanisme perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) dan dari atas ke bawah (top down) serta untuk lebih komprehensif dan terpadu sehingga dapat tercapai titik temu antara aspirasi dan kebutuhan daerah yang mendesak dengan kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional. Serta dikeluarkannya peraturan pemerintah yaitu Undang-undang Kemasyarakatan Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana dalam peraturan pemerintah ini memberikan ruang bagi partisipasi Masyarakat dan secara substantif menempatkan masyarakat sebagai instrument yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial.

Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui isisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2000:21), definisi atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk meningkatkan income, tetapi juga pemerataan.

2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:

- a. *Lifesustenance* : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- b. *Self-Esteem* : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memilikihargadiri, bernilai, dan tidak “diisap”oranglain.
- c. *FreedomFromSurvitude*:Kemampuanuntukmelakukanberbagai pilihan dalam hidup,yangtentunyatidak merugikan oranglain.

Konsepdasar diastelahmelahirkanbeberapa artipembangunanyang sekaranginimениjadi popular (Todaro, 2000:24),yaitu:

- 1.*Capacity*,halini menyangkut spekkemampuanmeningkatkanincome atau produktifitas.
- 2.*Equity*, halini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
3. *Empowerment*,halini menyangkut pemberdayaanmasyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnyadan sesamanya.
- 4.*Sustainable*, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Rostowdalam Arief (1996: 29) pengertian pembangunan tidak hanyapadalebihbanyakoutputyang dihasilkan,tetapijugalebihbanyakjenis outputdaripadayang diproduksisebelumnya.Dalamperkembangannya, pembangunan melaluitahapan-tahapan:masyarakattradisional,prakondisi lepas landas,lepaslandas,gerakanmenujukematangandanmasa konsumsi besar-besaran.Kuncidiantaratahapaniniadalahapttinggallandasyangdidorong oleh satu

sektor atau lebih (Arief, 1996:30).

Menurut Gantdalam Suryono(2001:31), tujuanpembangunanada dua tahap.

Pertama,pada hakikatnya pembangunanbertujuanuntukmenghapuskan kemiskinan.Apabila tujuaninisudah muladirasakanhasilnya,maka tahap*kedua* adalahmenciptakakesempatan-kesempatanbagi warganya untukdapathidup bahagia dan terpenuhi segalakebutuhannya.

Untukmencapaikeberhasilanpembangunantersebut,makabanyakaspekatauhal -halyangharusdiperhatikan,yang diantaranyaadalahketerlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono, 2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakatdilibatkandalamerencanaanpembangunan,yaitu, *Pertama*,pembangunanakanberjalansuaidengankebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jikamasyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akanterciptakontrolterhadappembangunantersebut.*Kedua*,pembangunan yang berorientasipada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karenamasyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan,sehingga masyarakat bisa menjadikontrol terhadap pembangunanyangsedangterjadi.

Pembangunandapatdiartikansebagaiusuatuusaha sadardalamserangkaian kegiatanuntukmencapaisuatuperubahandarikeadaanyang burukmenujuke keadaanyang lebih baikyang dilakukan oleh masyarakattentu disuatuNegara. SondangP. Siagian, (1981:21) mendefinisikan pembangunan adalah: “Suatuusahaatau serangkaianusahapertumbuhanperubahanyang berencanayang dilakukansecarasadarolehsuatubangsa,Negara dan pemerintahan dalam

usahapembinaan bangsa.”

Berdasarkanpendapattersebut,maka dalamkonseppembangunanterdapat dua syaratyang harusdipenuhiyakni:harusadausahayang dilakukanoleh masyarakatdanpemerintahnya,dilaksanakansecara sadar,terarahdan berkesinambunganagar tujuan dari pembangunanitu dapat tercapai.

Daribeberapa syaratyangharusdipenuhidalampebbangunantersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakatyang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupanyangpenuh harmonis.

2.3 Ciri-ciri danPrinsipPembangunanDesa

Pembangunandesa denganberbagaimasalahnya merupakanpembangunan yangberlangsung menyentuhkepentinganbersama. Dengandemikiandesa merupakantitiksentraldari pembangunannasionalIndonesia.Olehkarena itu, pembangunandesa tidakmungkin bisa dilaksanakanoleh satupihaksaja,tetapi harus melaluikoordinasidenganpihak lainbaikdenganpemerintahmaupun masyarakat secarakeseluruhan.

Dalammerealisasikanpembangunandesaagar sesuaidenganapayang diharapkan perlumemperhatikan beberapa pendekatandenganciri-ciri khusus yang sekaligusmerupakanidentitaspembangunandesaitusendiri, sepertiyang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251)yaitu :

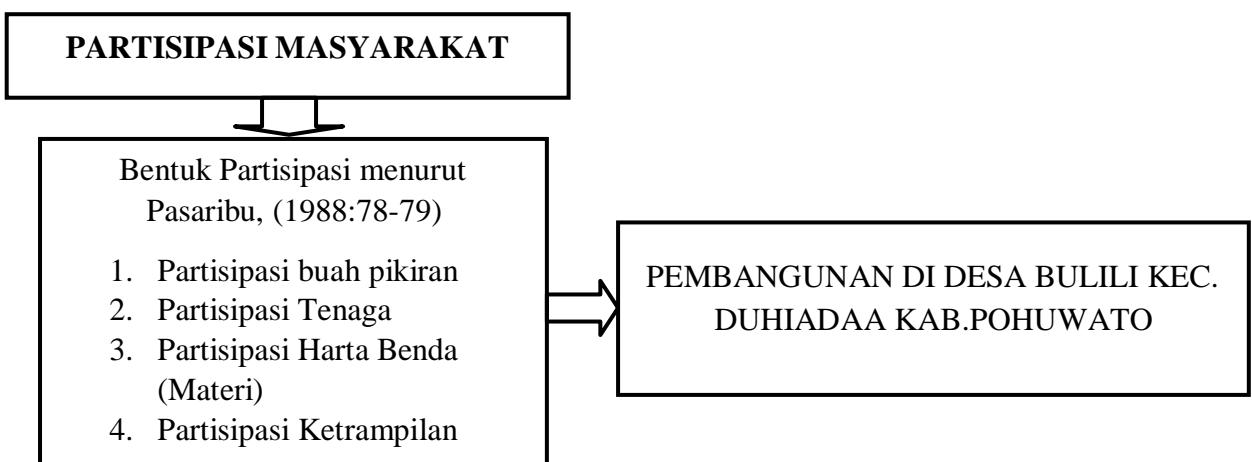
1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraanmaupunaspek keamanandenganmekanisme dansistem pelaksanaanyang terpaduanterberbagaikegiatanpemerintaha dan masyarakat.

2. Perpaduan sasaran sektor al dan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi didalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yang ada di sekitar dan menerus demikian tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Obyek dan waktu Penelitian

Adapun obyek penelitian yang dituju oleh peneliti adalah Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bulili Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwatao yang direncanakan akan dilaksanakan selama 3 bulan.

3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

3.3. Operasional Variabel

Operasional Variabel merupakan penjelasan dari kerangka konsep yaitu bagaimana Partisipasi Masyarakat di Desa Bulili Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bulili, adapun beberapa operasionalisasi variabel yang dianggap perlu untuk dipaparkan adalah sebagai berikut :

- a) Partisipasi buah pikiran, adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu komunitas atau organisasi dalam bentuk ide-ide pemikiran, baik dalam tahapan pira rencana, maupun dalam penyusunan rencana serta implementasinya, seperti ikut dalam pertemuan dan rapat ataupun melakukan kritik dan sara atas apa yang sedang akan dilaksanakan.
- b) Partisipasi tenaga, adalah suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan- kegiatan pembangunan untuk kepentingan bersama,yang umumnya dalam bentuk gotong royong, seperti aktif dalam perbaikan-perbaikan saluran-saluran air (drainase), pos kamling, sarana ibadah dan lain-lain sebagainya.
- c) Partisipasi harta benda (materi), yaitu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di lingkungannya dalam bentuk memberikan sumbangan harta benda berupa uang atau materi baik sukarela maupun sedikit mobilisasi.
- d) Partisipasi keterampilan, yaitu keterlibatan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan keterampilan atau keahlian yang dimilikinya, seperti keahlian dalam bidang perencanaan, menggambar (arsitek), keahlian bidang pertukangan (tukang batu,tukang kayu), dan lain-lain sebagainya.

3.4. Informan Penelitian

Pembangunan di Desa Bulili Kecamatan Marisa memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah yang penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat.

Serta Informan yang diambil dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi, informan diambil dengan maksud tidak mesti menjadi wakil dari seluruh populasi, tetapi informan memiliki pengetahuan yang cukup, serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian, Oleh sebab itu, informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Kepala Desa Bulili | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris Desa | : 1 Orang |
| 4. Kepala-kepala Seksi | : 3 Orang |
| 5. Kaur-Kaur | : 3 Orang |
| 6. Ketua BPD | : 1 Orang |
| 5. Tokoh Masyarakat | <u>: 3 Orang</u> |
| Jumlah | 12 Orang |

3.5. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literature yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya materi atau dokumen dari Kantor Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa, dan

Kantor Camat Duhiadaa serta instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Observasi, yaitu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam proses mekanisme perencanaan pembangunan di Desa Bulili Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato melalui berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian ini serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, literatur, laporan tahunan mengenai dokumen rencana kerja pembangunan, dokumen

rumusan hasil musrenbang, dan dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3.7. Teknik Analisi Data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis, dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkn atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangn dilakukan angkah- langkah sebgai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi
2. Reduksi data; Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami.

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal

4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Desa

Desa Bulili awalnya merupakan sebuah dusun yang namanya Dusun Popaseda dari wilayah Desa Buntulia Selatan, Wilayah dusun tersebut dimekarkan menjadi desa Bulili pada tanggal 15 April pada tahun 1995, dengan alasan mempermudah alur pemerintahan, mempermudah pelayanan public serta mempermudah pelayanan pembangunan terhadap masyarakatnya. Sebab setiap pertemuan di kantor desa dan kegiatan sosial lainnya seringkali masyarakat dusun Popaseda khususnya masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai yang sekarang menjadi dusun Tanjung tidak bisa hadir karena tidak adanya akses jalan dan melewati hutan bakau.

Inisiatif para tokoh masyarakat setempat untuk memekarkan dusun Popaseda menjadi satu desa definitif telah mendeklasikan perwakilan masyarakat yang di koordinir langsung oleh bapak Hasan Djajalani dan beberapa tokoh masyarakat lainnya diantaranya Bapak Abdurahman Ali, bapak Hamzah Ibrahim, Sode Olii, Bapak Kana Kadir, Bapak Sune Abay, Bapak Buge Bahuwa, Bapak Nasur Hunowu, Bapak Yakob Hunowu bertemu langsung di rumah bapak Kepala Desa Buntulia Selatan pada bulan Januari 1994. Pada pertemuan tersebut mendapat restu dari kepala Desa.

Setelah mendapat persetujuan dari kepala Desa tersebut, maka dibentuklah panitia pemekaran dengan membuat Proposal usulan Pemekaran Desa yang di prakarsai oleh Bapak Hasan Djalajani dan beberapa tokoh Masyarakat lainnya.

Langkah pertama yang dilakukan oleh panitia pemekaran adalah menyusun proposal pemekaran. Dalam penyusunan proposal pemekaran panitia tidak mendapat hambatan apapun kecuali ada sedikit perbaikan usulan nama desa sebelumnya ***Popaseda menjadi Desa Bulili***, sehingga proposal langsung disahkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Propinsi Sulawesi Utara. Maka pada tahun 1995 desa Bulili sudah resmi menjadi salah satu desa di wilayah Kecamatan Marisa pada waktu itu dan sekarang menjadi Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

Langkah selanjutnya yang dilakukan panitia pemekaran adalah pembentukan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) pada tanggal 10 Februari 1995 dan dipilihlah Bapak **Ridwan Anwar** sebagai ketuanya.

Kemudian LKMD Membentuk Panitia Pilkades Bulili yang di ketuai oleh bapak **IWAN ABAY** selanjutnya dilaksanakan pilkades pertama pada tanggal 10 Maret 1995 pada saat itu Masih kepala Desa Persiapan Bulili adalah bapak Hasan Djalajani. Hal ini merupakan tanda sejarah dimana Desa Bulili sudah definitif serta telah melaksanakan pesta demokrasi Pilkades pertama yang pada waktu itu ada 2 (dua) calon yaitu :1. Ibu Marni Nento dan 2. Bapak Hasan Djalajani, dan pada saat pemilihan terpilihlah bapak **HASAN DJALAJANI sebagai Kepala Desa Bulili**. yang di SK langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Bapak EE Mangindaan nomor : 95 Tahun 1995 Tanggal 21 maret 1995.

Bapak Hasan Djalajani menjadi Kepala Desa sejak tahun 1995 hingga tahun 2001, yang kemudian di gantikan oleh Bapak Ibrahim Nota (Kepala Desa ke Dua) dari tahun 2001 hingga tahun 2008, kemudian kepala Desa berikutnya adalah Bapak Nawaf Hunowu sebagai (kepala Desa yang ke tiga) sejak tahun 2008. kemudian Kepala Desa berikutnya adalah Bapak Suharto Hamzah sebagai (kepala Desa yang ke Empat) sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 Kemudian Kepala Desa Berikutnya adalah Bapak Muhtar Lopuo adalah (Kepala Desa Devinitif yang Ke empat) sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang.

**Tabel : 4.1
Periode Kepemimpinan Desa Bulili**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Lama Jabatan
1	1993 - 2001	Hasan Djalajani	7 Tahun
2	2001 – 2008	Ibrahim nota	8 Tahun
3	2008 – 2013	Nawaf Hunowu	6 Tahun
4	2013 – 2019	Suharto Hamzah	7 Tahun
5	2020 – 2025	Muhtar lopuo	Sekarang

Sumber : Desa Bulili 2021

4.1.2. Visi dan Misi

4.1.2.1 Visi

VISI merupakan gambaran kondisi ideal yang diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa bulili, visi tersebut adalah arah pembangunan desa yang dicita- citakan sebagai tujuan masa depan desa.

Visi desa bulili untuk masa jabatan pemerintahan tahun 2020-2025 adalah “ Mewujudkan Desa Bulili Menjadi Desa Hijau, Cerdas Dan Mandiri Melalui Bidang Pertanian, Pembangunan Dan Kelautan.”

4.1.2.2 Misi

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi desa bulili tahun 2020-2025, “ Mewujudkan Masyarakat Desa Bulili maka ditetapkan misi pembangunan desa sebagai berikut :

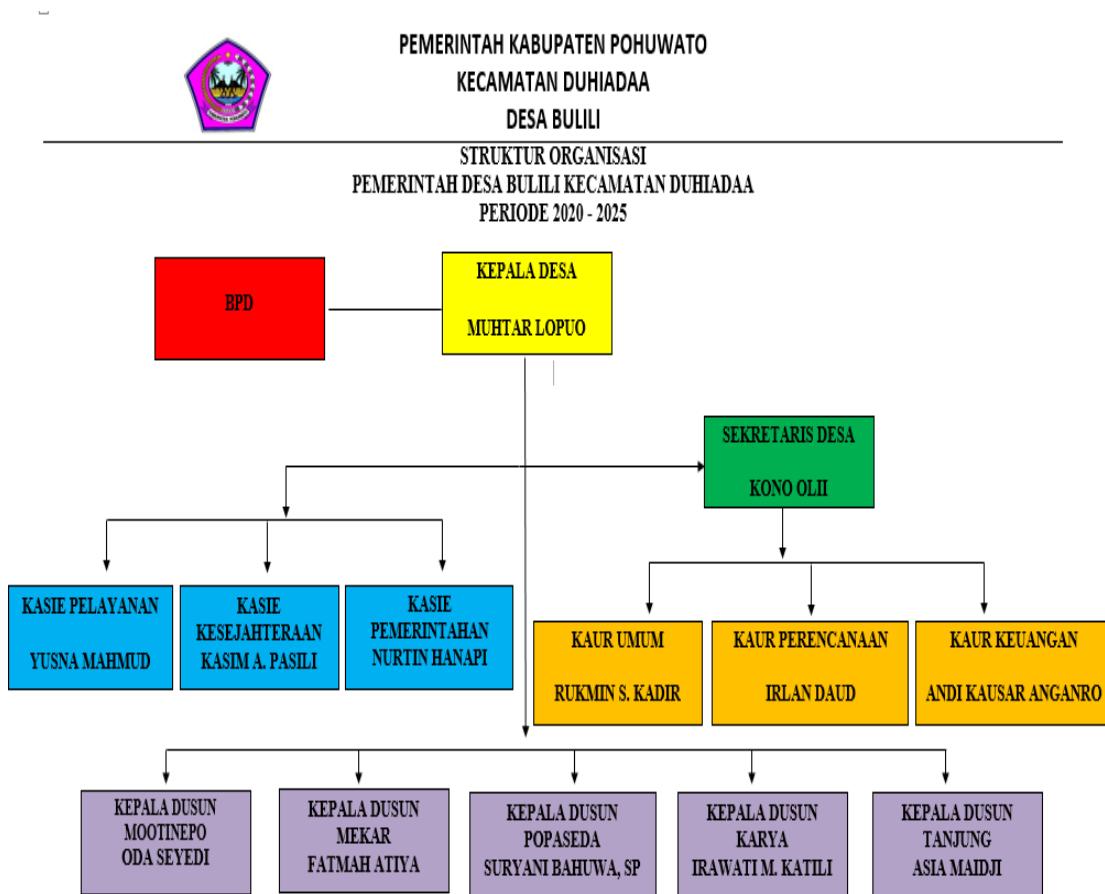
1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam desa bulili yang berkelanjutan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia desa bulili yang berkualitas
3. mewujudkan desa bulili yang mandiri

Oleh karena itu untuk mewujudkan visi desa bulili sebagaimana tersebut diatas, akan dijabarkan melalui misi sebagai berikut:

1. Terciptanya kawasan yang hijau di desa bulili
2. Terciptanya keseimbangan ekosistem di desa bulili
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
4. Menurunnya angka melek huruf dan baca tulis alquran
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat desa bulili
6. Terciptanya ekonomi desa bulili yang mandiri
7. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa.
8. Terwujudnya pemerintahan desa yang bersih dan amanah.

4.1.3 Struktur organisasi Pemerintah Desa

Pemerintahan desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato



4.1.4 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa

Tugas dan pungsi pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa, sebagai berikut.

1. Kepala Desa

- a. Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA)
- b. Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kerja Desa (RKP DESA)
- c. mensosialisasikan RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelanggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan di tetapkan bersama BPD
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa
 - f. Membina perekonomian desa
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat mengujuk kuasa hukum mewakilanya sesuai dengan aturan perundang-undang
- a. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undang

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia
- b. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- c. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- d. Membina mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- f. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- g. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
- h. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan
- i. Menjalani hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa
- j. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
- k. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- l. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- m. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. sekretaris desa

Sekretaris desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan keuangan desa

serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 9, secretariat desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan
- b. Pelaksanakan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan
- c. Pelaksanaan urusan administarasi keuangan
- d. Pelaksanaan urusan surat-menjurut kearsipan dan laporan

3. bendahara desa

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara desa adalah unsure staf sekretaris desa yang membindangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.Bendahara desa merupakan bagian dari PTPKD.PTPKD atau pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.Bendahara di jabat oleh staf pada urusan keuangan.

4. kepala urusan umum

Tugas kepala urusan umum, sebagai berikut :

- a. Membina dan melayani perizinan
- b. Membina dan melayani administrasi kependudukan
- c. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
- d. Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintahan
- e. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
- f. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administrasi pembinaan kehidupan masyarakat desa

5. kepala urusan perencanaan

Tugas kepala urusan perencanaan, sebagai berikut:

- a. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- b. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaan atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- d. Melaksankan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- e. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- f. Menyusun DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), DPPA (dokumen perubahan pelaksanaan anggaran), dan DPAL (dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan) sesuai bidang tugasnya

6. kepala urusan keuangan

Tugas kepala keuangan, sebagai berikut :

- a. Adminstarsi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD , dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- b. Verifikasi administrasi keuangan
- c. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
- d. Pengurusan administrasi keuangan
- e. Menyusun rencana anggaran kas desa
- f. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima,menyimpan, menyetorkan,membayar,menatausahakan,mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDeda

7. kepala dusun

Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan diwilayah kerjanya. Kepala dusun mempunyai tugas :

- Pelaksanaan kebijakan kepala desa
- Pelaksanaan peraturan desa di wilayah kerjanya
- Pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan diwilayah kerjanya.

8. badan permusyawaratan desa

BPD mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

- c. Merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa
- BPD mempunyai wewenang
- a. Menyusun tata tertib BPD
 - b. Menggali, menampung, menghipun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - c. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - f. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa

Anggota BPD mempunyai hak

- a. Memperoleh tunjangan
- b. Memilih dan dipilih
- c. Menyampaikan pendapat
- d. Mengajukan pertanyaan
- e. Mengajukan rancangan peraturan desa

Anggota BPD mempunyai kewajiban

- 1. BPD berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa
- 2. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan
- 3. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat

4. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
5. Memproses pemilihan kepala desa
6. Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
7. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta ketuhanan Negara repoblik Indonesia
8. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintah desa

Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara RI tahun 1945 dan mentaati

Segala peraturan perundang-undagan

4.1.2.4 Sasaran

Aparat desa dan masyarakat bulili mewujudkan desa bulili yang mandiri

Table 4.2
Pemerintahan desa bulili dan jajarannya

No	Nama	Jabatan	Usia	Masa Jabatan	Pendidikan
1.	Muhtar lopou A.md	Kepala desa	34 thn	2020-2025	S1
2.	Kono uloli	Sekretaris desa	37 thn	2016-skrng	SMA
3.	Nuryati ngandro. S.pd	Bendahara	29 thn	2015-skrng	S1
4.	Rukmin kadir	Kaur umum	37 thn	2015-skrng	SMA
5.	Irlan daud	Kaur perencanaan	39 thn	2015-skrng	S1
6.	Andi kausar angandro	Kaur keuangan	35 thn	2015-skrng	S1
7.	Nurtin hanapi	Kasie pemerintahan	38 thn	2016-skrng	S1

8.	Yusna Mahmud	Kasie pelayanan	28 thn	2016-skrng	SMA
9.	Kasim A.pasili	Kasie kesejahteraan	40 thn	2016-skrng	SMA
10.	Asia maidji	Kepala dusun tanjung	53 thn	2009-skrng	SMA
11.	Suryani bahuwa, SP	Kepala dusun popaseda	40 thn	2009-skrng	S1
12.	Fatmah atiya	Kepala dusun mekar	39 thn	2009-skrng	SMA
13.	Irmawati M.katili	Kepala desa karya	41 thn	2009-skrng	SMA
14.	Oda seyedi	Kepala desa mootinepo	44 thn	2009-skrng	SMA

Sumber : Desa Bulili 2021

**Table : 4.3
Badan Permusyaratan Desa**

No	Nama	Jabatan	Usai	Masa Jabatan	Pendidikan
1.	Yanto Ashari	Ketua	39 tahun	2019-skrng	S1
2.	Abd.Rahman Lamusi	Wakil Ketua	38 tahun	2019-skrng	S1
3.	Sulastri Suparman	Sekretaris	31 tahun	2019-skrng	S1
4.	Suwarni Hunowu	Anggota	34 tahun	2019-skrng	S1
5.	Dwisko Katili	Anggota	33 tahun	2019-skrng	S1
6.	Alan Babunga	Anggota	40 tahun	2019-skrng	S1
7.	Rusman Ali	Anggota	36 tahun	2019-skrng	S1
8.	Anton Baruadi	Anggota	38 tahun	2019-skrng	S1
9.	Aksun Ismail	Anggota	41 tahun	2019-skrng	S1

Sumber : desa bulili 2021

4.2. Uraian Hasil Penelitian

4.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bulili

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan integral proses dinamika pembangunan, yang sangat penting, karena secara prinsip pembangunan di tunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat.

Melihat bentuk partisipasi yang dikemukakan di atas, bagi masyarakat desa bulili dengan kehidupan untuk mencapai sukses pembangunan hendaknya lebih mengetahui kemampuan dan keadaan nyata dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang berkaitan dengan pembangunan.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat yang secara umum mewarnai masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi tersebut apabila diklasifikasikan secara ideal, maka menurut hemat penulis dan empat aspek yang dibentuk ideal partisipasi masyarakat desa bulili dalam pelaksanaan pembangunan yaitu partisipasi dalam buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda (

materi), dan partisipasi keterampilan. Keempat partisipasi tersebut dapat dilihat melalui serangkaian uraian hasil penelitian.

4.2.1.1 Partisipasi buah pikiran

Partisipasi masyarakat buah pikiran secara langsung dalam setiap proses pembangunan suatu masyarakat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Idealnya suatu merupakan partisipasi masyarakat yaitu usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga proses pembangunan dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan secara adil dan sejahtera. Demikian pula secara sederhana dapat diketahui bahwa masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut ambil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri sudah di kategorikan ke dalam pengertian partisipasi. Oleh sebab itu dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan ini adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pendapat bapak kades bulili, ML yakni mengemukakan bahwa :

“ hasil perencanaan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan didesa bulili merupakan musyawarah yang diusulkan melalui rencana pembangunan desa bulili yang telah dilaksanakan bersama BPD, Aparat desa dan unsur masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui buah pikiran dalam pelaksanaan pembangunan dapat dirasakan melalui keikutsertaan maupun melalui partisipasi masyarakat desa bulili dalam kegiatan pembangunan yang berjalan selama ini, hal ini menandakan bahwa masyarakat ikut serta berperan atau berpartisipasi dalam setiap kegiatan

pelaksanaan pembangunan yang berada didesa bulili “ (wawancara tanggal 6september 2021)

Berhasilan suatu pembangunan terletak pada bagaimana keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Keikutsertaan tersebut mencerminkan suatu keberhasilan dari perencanaan yang dilakukan dalam kegiatan yaitu melalui tahapan-tahapan sebelum pada tahapan pengambilan keputusan. Oleh karena keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sebuah pemikiran menjadi sebuah pertimbangan sebelum dilaksanakan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran adalah pemerintah berupaya melibatkan masyarakat secara langsung melalui buah pikirannya dalam proses pembangunan. Partisipasi dapat dilaksanakan pada berbagai macam kesepakatan, seperti melalui pertemuan, rapat, saran dan tanggapan dari unsur masyarakat terhadap proses pembangunan.

Sumbangsi yang berupa ide-ide atau pemikiran yang di sampaikan baik secara langsung yang melalui kegiatan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bulili maupun yang disampaikan melalui lembaga-lembaga formal yang ada didesa bulili.Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di desa bulili dalam pelaksanaan pembangunan melalui buah pikiran, dapat dilihat pada keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam memberikanmasukan pendapat dan saran dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bulilikecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka diperoleh gambaran bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap musyawarah

yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato.Selain itu karena adanya kesadaran pribadi untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan di desa bulili tersebut.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah seorang informan yakni sekretaris desa bulili KU, yang mengatakan bahwa:

“ peran dari pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat untuk partisipasi buah pikiran secara aktif dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tapi terkadang masyarakat yang datang memenuhi undangan hanya beberapa orang saja, yaitu orang-orang yang bisa menyampaikan langsung pendapat atau ide, walapun ada masyarakat yang hanya sekedar hadir untuk memenuhi undangan pemerintah desa untuk menghadiri dan mendengarkan apa yang sudah dimusyawarakan bersama. “ (wawancara tanggal 10 september 2021)

Memperhatikan pernyataan informan di atas, dapat dijelaskan bahwa dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akan menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat dalam mengungkapkan segala ide pikiran dan pendapat serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada pelaksanaan pembangunan di desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato.

Hal tersebut di kuatkan melalui pernyataan informan yakni kepala dusun desa bulili, AM yang menyatakan bahwa :

“ pemerintah desa bulili selalu mengundang masyarakat jika ada pembangunan yang ingin dilakukan, masyarakat diikutsertakan dalam pelaksanaan rapat pembahasan tentang perencanaan, pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah desadan masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan ide pemikiran atau pendapat yang berkenan dengan usulan program pembangunan di desa bulili, partisipasi dalam bentuk buah pikiran seperti ini memang kami butuhkan, dan kami juga berharap agar masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nanti dapat berpartisipasi. “ (wawancara 13 september 2021)

Berdasarkan pernyataan informan di atas, dapat dijelaskan bahwa peran masyarakat dalam berpartisipasi telah terlihat melalui keikutsertaan mereka sejak dalam kegiatan rapat pembahasan atau musyawarah desa yang dimaksudkan untuk memperoleh ide pikiran atau pendapat terkait dengan pelaksanaan pembangunan di desa bulili sehingga dapat memberikan dukungan atas pelaksanaan pembangunan tersebut. Masyarakat merasa dihargai serta pembangunan tersebut. Masyarakat merasa dihargai serta diberi peran yang penting dalam perencanaan serta pembangunan bahkan sampai kepada pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan nanti.

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat, SB tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ide pikiran pendapat dinyatakan bahwa :

“ kami sebagai warga masyarakat desa bulili ini selalu diundang oleh kepala desa untuk menghadiri rapat pembahasan setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam rapat tersebut kami selaku masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap program jika ada pembangunan yang dilakukan, diantara kami masyarakat yang ikutserta dalam pelaksanaan pembangunan rapat pembahasan tentang perencanaan, pelaksanaan pembangunan diberikan kesempatan untuk memberikan ide pikiran maupun saran yang berkenan dengan usulan program pembangunan di desa bulili, partisipasi dalam usulan program pembangunan desa bulili, partisipasi dalam bentuk ide seperti ini memang menjadi harapan pemerintah desa sebab menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bersama”. (wawancara 14 september 2021)

Sejalan dengan pendapat informan di atas, dapat pula penulis gambarkan pernyataan dari tokoh masyarakat lainnya, IY dikatakan bahwa :

“ selama ini saya lihat pemerintah desa selalu mengundang masyarakat jika ada kegiatan rapat yang dilaksanakan terkait dengan program pembangunan yang direncanakan kehadiran kami pada rapat pembahasan tentang perencanaan, pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah desa masyarakat tersebut kami diberikan kesempatan untuk memberikan saran, pendapat/pemikiran yang berhubungan dengan usulan program pembangunan di

desa bulili, partisipasi dalam bentuk ide seperti ini memang dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam rangka pengambilan keputusan tentang usulan program dari pemerintahan desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato”. (wawancara 15 september 2021).

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan berbagai informan di atas, menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa bulili sudah baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai argument serta pernyataan dari informan, bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah diharapkan oleh pemerintah desa, sebab terkait dengan pengambilan sebuah keputusan terhadap program usulan maupun program kerja pemerintah desa dalam kurun waktu setahun. Hal ini juga sangat penting mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat agar dalam perjalanan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa tidak akan mengalami hambatan ataupun kendala jika program tersebut sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dapat juga menjadi sebuah kesempatan masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan program yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

4.2.1.2 Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga

Partisipasi tenaga adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut hasil penelitian bahwa partisipasi melalui tenaga atau secara fisik dapat dilakukan oleh siapa saja sepanjang mereka memiliki kemauan serta kesempatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti gotong royong, membersihkan tempat ibadah (mesjid), membersihkan kantordesa, perbaikan jalan atau memperbaiki jembatan serta kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat yang ada di desa bulili.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di desa bulili bapak AB dan MB :

“kebiasaan masyarakat berpartisipasi secara langsung dengan memberikan ide, pendapat serta membantu pemerintah desa bulili, masyarakat akan memberikan partisipasinya melalui tenaga, dimana mereka menjadi masyarakat yang peduli dengan desanya sehingga masyarakat membantu pemerintah desa dalam pekerjaan tersebut. Karena mereka tida memiliki kemampuan dalam memberikan dana sehingga partisipasi masyarakat langsung bekerja bersama”
“ bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah desa bulili melalui sumbangsi tenaga untuk melakukan kegiatan di desa sebagai contoh melakukan pembersihan, maupun kegiatan-kegiatan yang memerlukan bantuan dari segi tenaga masyarakat itu sendiri (wawancara tanggal 16 september 2021).

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat desa bulili dalam bentuk tenaga dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan kerja bakti. Seperti data yang diperoleh melalui informan, diketahui bahwa kegiatan yang melibatkan fisik atau tenaga masyarakat seperti gotong royong dalam membersihkan sampah-sampah. Partisipasi pembangunan tidak hanya pada saat pelaksanaan. Tapi juga perawatan dan pemeliharaan bangunan juga tetap merupakan partisipasi dari pembangunan.

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti data yang diperoleh melalui informan dalam penelitian diketahui bahwa partisipasi dalam bentuk fisik yang sifatnya seperti gotong royong adalah merupakan suatu tradisi yang sudah turun temurun bagi masyarakat desa bulili. Alasan lain adalah adanya suatu kebersamaan bagi masyarakat untuk membangun desanya.

4.2.1.3 partisipasi dalam bentuk harta benda (materi)

Selain kebutuhan akan dana dalam pembangunan di desa bulili, tetapi yang tidak kalah penting adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk materi. Tidak semuanya masyarakat menyumbang dalam bentuk uang tetapi ada juga

masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk materi, hal ini didasari karena adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desanya.

Sumbangan harta benda (materi) biasanya dilakukan secara langsung. Dimana sumbangan materi tersebut diperuntukan untuk pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan mesjid, jembatan, perbaikan jalan dan sarana-sarana umum lainnya.

Alasan lain yang diungkapkan informan bahwa untuk menyumbang dalam bentuk materi prosedurnya agak menyita waktu dan tenaga.

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh bapak kades dan ketua BPD desa bulili bapak ML dan RA yang mengatakan bahwa:

“ partisipasi masyarakat dengan memberikan sejumlah bahan material yang dibutuhkan jika ada pekerjaan seperti halnya perbaikan jalan, jembatan dan pembersihan area sekitaran desa bulili. Kerja bakti di desa bulili, jika saya memperhatikan selama ini bahwa partisipasi yang diberikan masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat memiliki tanggung jawab yang begitu besar kepada desa bulili dalam hal ini sumbangsi atau bantuan dalam bentuk harta (Materi) yang dibutuhkan.

“ demitujuan yang lebih baik, masyarakat desa bulili selalu memberikan bantuan benda ataupun barang (materi), sebagai contoh kecil yang dilakukan oleh masyarakat desa bulili dengan memberikan maupun membuat sebuah tempat sampah sehingga untuk sama-sama bisa menjaga kebersihan disekitaran lingkungan ” (wawancara 17 september 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang diperoleh dari beberapa informan bahwa partisipasi masyarakat yang diberikan dalam pembangunan, biasanya dalam bentuk bahan material seperti pasir, batu, kayu dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa bulili sudah sangat dirasakan oleh pemerintah desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa bulili sangat menunjang keberlangsungan pembangunan

selama ini. Masyarakat merasa memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah sehingga mereka tidak segan-segan berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan.

4.2.1.4 Partisipasi dalam bentuk keterampilan

Partisipasi keterampilan yaitu keterlibatan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan keterampilan atau keahlian yang dimilikinya, seperti keahlian dalam bidang perencanaan, menggambar dan lain sebagainya. Partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa bulili dari perencanaan dan dorongan masyarakat dalam bekerja bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa bulili bapak ML dinyatakan bahwa :

“ jika seluruh rangkaian pelaksanaan pembangunan akan berlangsung maka seperti biasanya saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa apabila masyarakat ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa bulili dapat menyampaikan dalam bentuk apa saja. Kami sangat berterimah kasih kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi.(wawancara tanggal 20 september 2021).

Berdasarkan penguraian tentang empat bentuk partisipasi masyarakat tersebut, maka secara umum dapat kita menganalisa bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa bulili dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengukur partisipasinya dalam bentuk buah pikiran, tenaga, harta benda (materi) dan partisipasi keterampilan yang disebutkan terdahulu.

Dapat digambarkan disini bahwa partisipasi masyarakat telah nampak bukan hanya dalam pelaksanaan pembangunan, namun keterlibatan masyarakat telah nampak sejak pelaksanaan perencanaan pembangunan hingga pada akhir pelaksanaan pembangunan. Artinya bahwa peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasinya dalam pembagunan di desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato sudah baik.

Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua BPD desa bulili bapak RA mengatakan bahwa :

“partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan bersama unsur masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui pemikiran ataupun ide dalam rangka pembangunan dapat dirasakan melalui keikutsertaan maupun melalui partisipasi masyarakat. Hal ini menandai bahwa masyarakat ikut serta berperan atau berpatisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan di desa Bulili ” (wawancara 21 september 2021).

Keberhasilan suatu pembangunan, terletak pada bagaimana keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Keikutsertaan tersebut mencerminkan suatu keberhasilan dari perencanaan yang dilakukan dalam kegiatan yaitumelalui tahapan-tahapan sebelum pada tahapan pengambilan keputusan.

4.3 Pembahasan

Partisipasi memiliki makna keterlibatan, partisipasi masyarakat bukan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja. Partisipasi merupakan suatu proses dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik. Partisipasi mengandung makna keterlibatan adanya

kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Melalui keterlibatan masyarakat secara langsung terhadap proses pembangunan secara bersamam-sama dengan pemerintah maka akan tercapai tujuan pembangunan yang sesungguhnya. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan suatu rencana program pembangunan sampai pada pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakan masyarakat dalam suatu rencana program pembangunan agar mencapai sasaran yang diinginkan.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat melalui nilai-nilai kerjasama, gotong royong dan berbagi kearifan local dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara langsung melalui partisipasinya dalam bentuk ide pemikiran dan pendapat sangat membantu peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun upaya yang dilakukan dalam menyakinkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu melalui komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi. Masyarakat dalam pembangunan didesa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato.

Adapun pengertian partisipasi sebagai berikut : “partisipasi adalah sebagai ketersediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan

setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri “. (santoso sastropoetra 1986:3) jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi anatara lain :

- a. partisipasi dengan jasa (service participation)
- b. partisipasi dengan uang (money participation)
- c. partisipasi dengan barang (material participation)
- d. partisipasi dengan keahlian (with skill participation)
- e. partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif (aktif participation)
- f. partisipasi dengan tenaga (physical participation)
- g. partisipasi dengan pemikiran (psychological participation)
- h. bentuk pembangunan proyek komuniti yang otonom
- i. bentuk melakukan pembangunan dalam lingkungan keluarga
- j. bentuk mengadakan perjanjian bersama untuk bekerjasama melampaui suatu tujuan/ cita-cita
- k. bentuk aksi masa mengerjakan proyek secara sukarela
- l. bentuk sumbangan dalam bentuk jasa kerja
- m. bentuk proyek yang dibiayai oleh komonite setelah ada consensus dalam rapat komonuti
- n. bentuk sumbangan dari luar dalam bentuk proyek yang bersifat berdikari
- o. bentuk sumbangan spontan berupa barang/jasa
- p. bentuk konsultasi

Partisipasi masyarakat desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato yang meliputi, buah pikiran, tenaga, harta benda (materi), keterampilan sudah cukup baik karena rata-rata dari kemepata partisipasi tersebut dilakukan

tetapi satu hal yang sangat menonjol yaitu partisipasi tenaga, Karena pada umumnya masyarakat di desa bulili sebagian adalah nelayan dan petani sehingga penghasilan yang mereka peroleh tidak menentu maka hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak berkemampuan berpartisipasi dengan memberikan uang/dana, materi.barang, mereka hanya memiliki kemampuan berpartisipasi lebih muda dengan menggunakan atau menggantikannya dengan tenaga, begitu juga partisipasi mengenai pemikiran atau ide partisipasi ini hanya orang tertentu saja yang selalu berpartisipasi karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan. Masyarakat didesa bulili rata-rata memiliki pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang kurang sehingga ide yang muncul paling banyak dari orang tertentu saja.

Untuk menjadikan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai pembangunan di desa bulili sangat ditentukan oleh peran pemerintah dalam memberikan motivasi maupun dorongan serta perhatian yang cukup sehingga partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah desa akan terwujud dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato. Partisipsi masyarakat masih perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar masyarakat dapat mengoptimalkan partisipasinya dalam pembangunan sehingga akan memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.

Sebagaimana temuan penelitian diatas, dapat pula digambarkan bahwa dari keempat bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan didesa bulili

menunjukkan bahwa partisipasi yang lebih dominan dan cenderung dilakukan masyarakat adalah partisipasi melalui ide-ide dan tenaga. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui dana atau material belum maksimal dapat terpenuhi karena masyarakat desa bulili masih dominan penghasilan mereka tidak menentu. Bahkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya mereka masih lebih banyak bergantung pada pekerjaan yang sifatnya sementara atau sewaktu-waktu saja.

Partisipasi masyarakat desa bulili dalam kegiatan pembangunan akan berdampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan desa bulili itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar jiwa masyarakat akan tanggung jawab bersama-sama pemerintah dalam rangka memajukan desa mereka sendiri. Keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam setiap program pembangunan menggambarkan betapa pentingnya peran pemerintah desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Keberhasilan pembangunan juga sangat ditentukan oleh seberapa besar partisipasi masyarakat yang terlibat di dalamnya sejak pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai pada tingkat pengevaluasian hasil pembangunan. Sehingga akan lebih mudah pemerintah desa bulili dalam mengkomunikasikan dengan semua unsur yang berkepentingan di desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab terdahulu telah diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato. Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. Adapun kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV penulis dapat menarikkesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang meliputi :partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berbentuk buah pikiran, tenaga, harta benda (materi), keterampilan.
- 5.1.2 Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari masing-masing bentuk partisipasi tersebut, maka secara umum dapat dikatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato sudah baik tetapi ada beberapa partisipasi masyarakat yang perlu ditingkatkan yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berbentuk ide/pikiran, uang. Partisipasi ini dari hasil wawancara dengan beberapa informan : masih perlu peningkatan karena kedua partisipasi ini

juga sangat menentukan sukses atau tidaknya pembangunan yg di desa bulili.

5.2 Saran- saran

- 5.2.1 Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa bulili kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato yang masih perlu ada peningkatan dari dua bentuk partisipasi yaitu partisipasi mengenai ide dan pendapat, maka perlu adanya upaya-upaya oleh pemerintah untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- 5.2.2 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih cara bagaimana mereka atau berpartisipasi dalam pembangunan. Disamping itu pemerintah sesuai karakter masyarakatnya, dengan demikian akan terjalin adanya komunikasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe,Alexander.2005.*PerencanaanDaerahPartisipatif*.Yogyakarta:PustakaJogja Mandiri.
- Arif, Syaiful. 2006.*ReformasiBirokrasidanDemokratisasiKebijaka*.Malang: Averroes Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur PenelitianSuatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta.
- Arsyad, Lincoln. 2002. *Pengantar Perencanaandan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta:BPFE.
- Conyers,Diana.1991. “*AnIntroductiontoSocialPlanninginTheThirdWorld*”. By JhonWiley&SonsLtd.1994.TerjemahanDrs.Susetiawan.SU: “*PerencanaanSosialdiDuniaKetiga: SuatuPengantar*”.Yogyakarta: Gadjah MadaUniversityPress.
- Danim, Sudarwan. 2002.*MenjadiPenelitiKualitatif*. Bandung: PustakaSetia. Hadari, Nawawi. 2007. *Metode PenelitianSosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress.
- Hasan, IqbalM. 2002. *Metode Penelitianand Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta: CIDEAS.
- Khairuddin.1992.*Pembangunan Masyarakat. TinjauanAspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta:Liberty.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004.*Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Ndraha,Talizuduhu.1987.*PembangunanMasyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Nugroho, Riant. 2003.*Reinventing Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Sastropetro,SantosoR.A.1988.*Partisipasi,Komunikasi,Persuasi,danDisiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Supriatna,Tjahya.2000.*StrategiPembangunandanKemiskinan*.Jakarta:Rineka Cipta.
- Sugiono. 2004.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*.
- Tjokromidjojo, Bintoro. 1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Wrihatnolo, Randy R., dan Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar Panduan*. Jakarta: ElekxMedia Komputindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN 1**PEDOMAN WAWANCARA**

Nama Mahasiswa : Mutiara Baruadi

Nim : S2118122

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas : Ichsan Gorontalo

Judul Penelitian: Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

(Studi Kasus di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa

Kabupaten Pohuwato)

Identitas Informan :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Instansi :

Pertanyaan :

1. Partisipasi Buah Pikiran

- bagaimanakah keikutsertaan masyarakat menyampaikan pendapat dalam pembahasan perencanaan pembangunan didesa bulili ?
- bagaimana upaya pemerintah desa mengakomodir pikiran masyarakat dalam musyawarah didesa bulili ?

2. partisipasi tenaga

- bagaimana usaha-usaha masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di desa bulili ?
- bagaimana partisipasi masyarakat melalui keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan di desa bulili ?

3. partisipasi harta benda (material)

- bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam memberikan fasilitas penunjang pembangunan di desa bulili ?
- bagaimana jenis bantuan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah di desa bulili ?

4. partisipasi keterampilan

- bagaimana upaya pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat yang memiliki keahlian dalam pelaksanaan pembangunan di desa bulili ?

LAMPIRAN 2**FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN**

Wawancara Tgl 06 Agustus 2021, Jabatan Kepala Dusun An.ASIA MAIJI



Wawancara Tgl 01 September 2021, Jabatan Sekretaris Desa, An.KONO ULOLI

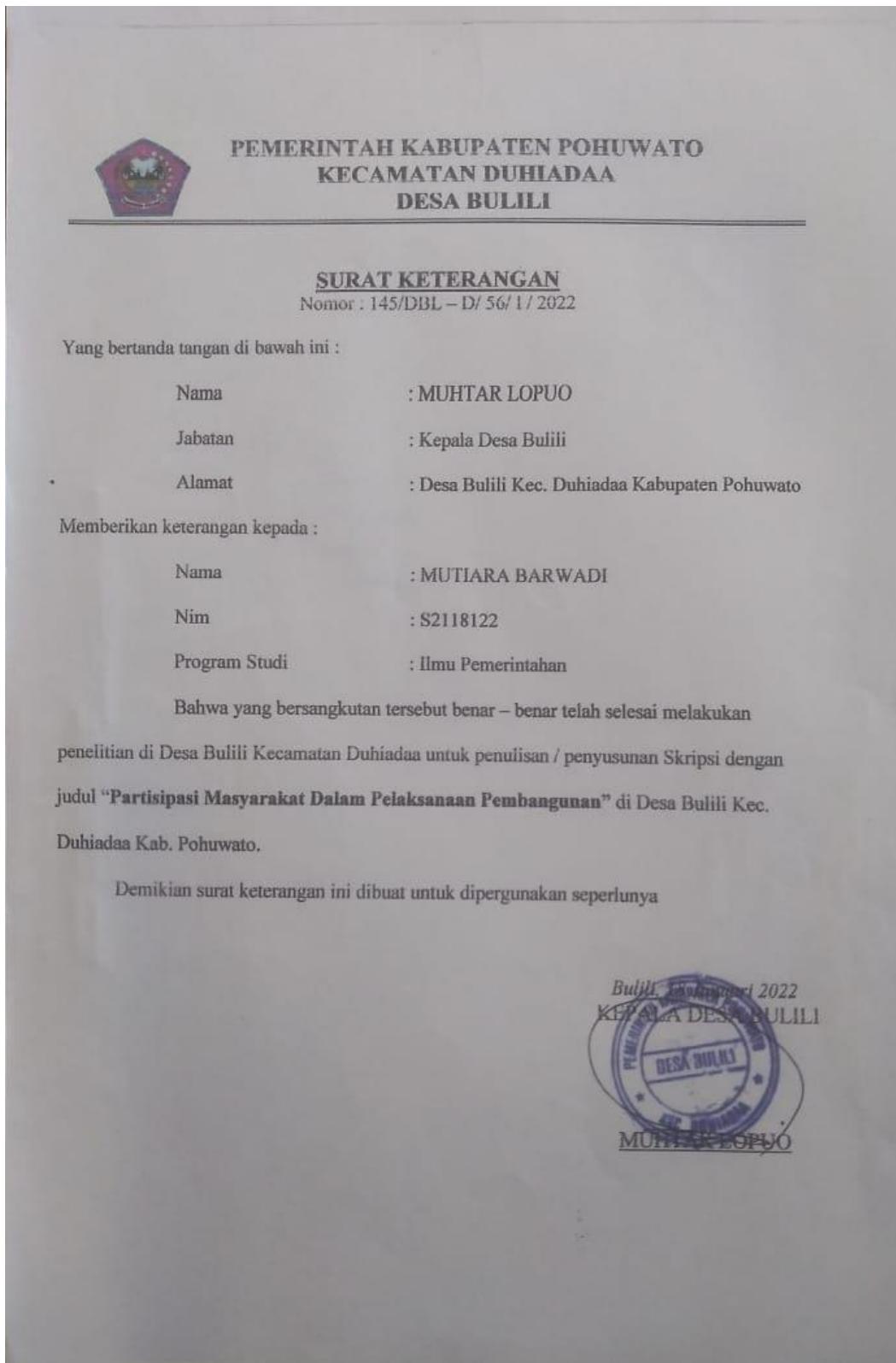


Wawancara Tgl 15 September 2021, Tokoh Masyarakat, An.INTAN ABAY



Wawancara Tgl 10 September 2021, Jabatan Kepala Desa Bulili, An.MUHTAR LOPUO

LAMPIRAN 3



LAMPIRAN 4



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0415) 829975 Fax (0415) 829976 Gorontalo**

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 140/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
 NIDN : 0924076701
 Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	MUTIARA BAWARDI
NIM	:	S2118122
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi	:	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar **18%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 Juni 2022

Tim Verifikasi,

Mengetahui
Dekan,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602

Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN DUHIADAA
DESA BULILI



SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/DBL – D/ 56/ 1 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHTAR LOPUO
Jabatan : Kepala Desa Bulili
Alamat : Desa Bulili Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato

Memberikan keterangan kepada :

Nama : MUTIARA BARWADI
Nim : S2118122
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Bahwa yang bersangkutan tersebut benar – benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa untuk penulisan / penyusunan Skripsi dengan judul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan**" di Desa Bulili Kec. Duhiadas Kab. Pohuwato.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

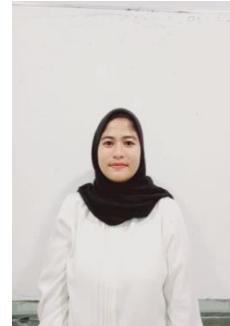


LAMPIRAN 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Mutiara Barwadi
Nim : S2118122
Tempat, Tanggal Lahir: Marisa, 31 Desember 1999
Angkatan 2018
Jurusan/Prog. Studi : Ilmu Pemeritahan
Status : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Bulili Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- SD Inpres Pohuwato Tahun 2007
- SMP N. 1 Marisa Tahun 2015
- MAN 1 Pohuwato tahun 2018
- Strata 1 (S-1) Universitas Ichsan Gorontalo Tahun 2022